BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, dan berkelanjutan melalui berbagai fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit daerah. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor kesehatan tidak hanya berorientasi pada aspek pelayanan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi rumah sakit dituntut mampu menyeimbangkan antara tujuan sosial dan efisiensi ekonomi agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Rumah sakit daerah merupakan institusi pelayanan publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan kesehatan, rumah sakit dituntut untuk mengelola sumber daya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurut Widodo et al. (2022) keberhasilan rumah sakit dalam memberikan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan keuangan yang mendukung operasional rumah sakit secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah menerapkan konsep Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada berbagai organisasi

pelayanan publik, salah satunya rumah sakit daerah untuk mendapatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar lebih efektif, efisiens, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan sistem pengelolaan keuangan yang dirancang untuk memberikan otonomi lebih luas kepada rumah sakit dalam menjalankan fungsi pelayanan. Melalui penerapan PPK-BLUD memungkinkan rumah sakit mengelola pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan untuk mendukung kebutuhan operasional secara lebih cepat dan efektif. Sebagaimana dinyatakan oleh Ardiansyah (2023), “implementasi PPK-BLUD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan organisasi layanan publik”.

Tujuan utama pemberian fleksibilitas keuangan kepada BLUD adalah meningkatkan kemandirian keuangan serta kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan adanya fleksibilitas tersebut, rumah sakit diharapkan mampu merespons kebutuhan pelayanan secara cepat tanpa terhambat oleh prosedur administrasi yang panjang. Selain itu, fleksibilitas keuangan juga menjadi instrumen penting dalam

meningkatkan daya saing rumah sakit di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat (Keumala et al., 2023).

Kinerja keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi PPK-BLUD. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola pendapatan, mengendalikan biaya, memenuhi kewajiban, dan menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan. Menurut Ramanda et al. (2023), penilaian kinerja keuangan rumah sakit dapat dilakukan melalui berbagai indikator seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang mencerminkan kondisi keuangan organisasi secara menyeluruh.

Pentingnya kinerja keuangan semakin terlihat ketika rumah sakit menghadapi berbagai tantangan, seperti peningkatan biaya operasional, kebutuhan investasi sarana dan prasarana, serta ketergantungan terhadap sumber pendapatan tertentu. Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagian besar rumah sakit pemerintah sangat bergantung pada pendapatan yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan. Ketergantungan tersebut menyebabkan arus kas rumah sakit rentan terganggu apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim atau kendala administratif lainnya (Sumarsi, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPK-BLUD memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap kinerja keuangan rumah sakit. Hasil penelitian Selekta et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan PPK-BLUD mampu meningkatkan beberapa indikator kinerja keuangan melalui pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa

fleksibilitas pengelolaan keuangan dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan rumah sakit.

Sedangkan hasil penelitian berbeda dengan Widodo et al. (2022) menemukan bahwa tidak seluruh indikator kinerja keuangan mengalami peningkatan setelah penerapan PPK-BLUD. Beberapa rasio keuangan menunjukkan perbaikan, sedangkan indikator lainnya masih menghadapi berbagai kendala. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi PPK-BLUD tidak selalu memberikan hasil yang seragam pada setiap rumah sakit.

Penelitian Keumala et al. (2023) juga menemukan bahwa terdapat perbedaan kondisi kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD pada rumah sakit daerah. Namun demikian, tingkat peningkatan kinerja keuangan dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya dan pendapatan rumah sakit. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi PPK-BLUD sangat bergantung pada kualitas tata kelola organisasi.

Penelitian Farwitawati (2020) menunjukkan bahwa perubahan status menjadi BLUD belum tentu secara langsung meningkatkan seluruh aspek kinerja keuangan rumah sakit. Beberapa rumah sakit masih menghadapi persoalan efisiensi dan pengelolaan sumber daya yang berdampak pada kondisi keuangan organisasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi PPK-BLUD masih menjadi isu yang relevan untuk diteliti.

RSUD Datu Beru Takengon merupakan salah satu rumah sakit daerah yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten

Aceh Tengah. Sebagai rumah sakit yang menerapkan PPK-BLUD, RSUD Datu Beru Takengon dituntut mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peran strategis tersebut menjadikan kondisi keuangan rumah sakit sebagai aspek yang penting untuk dikaji secara akademis.

Dalam perkembangannya, RSUD Datu Beru Takengon menghadapi berbagai tantangan terkait pengelolaan keuangan. Rumah sakit tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan di tengah meningkatnya kebutuhan operasional dan ketergantungan terhadap pendapatan dari klaim BPJS Kesehatan. Kondisi ini menuntut manajemen rumah sakit untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Fenomena yang menarik perhatian terjadi pada kondisi keuangan RSUD Datu Beru Takengon pada akhir tahun 2023. Berdasarkan keterangan manajemen rumah sakit, jumlah utang rumah sakit per 31 Desember 2023 mencapai Rp44.080.744.932. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit menghadapi kewajiban keuangan yang cukup besar sehingga memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang tepat agar operasional pelayanan tetap berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, hingga Juli 2024 rumah sakit telah melakukan pembayaran utang sebesar Rp38.064.645.398 sehingga sisa kewajiban yang harus diselesaikan mencapai Rp6.016.099.525. Meskipun sebagian besar utang telah berhasil dibayarkan, kondisi tersebut tetap menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan rumah sakit menjadi isu yang penting untuk dikaji. Besarnya kewajiban yang

pernah dimiliki rumah sakit dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap kondisi keuangan organisasi.

Selain menghadapi persoalan utang, manajemen RSUD Datu Beru Takengon juga menyatakan bahwa sumber utama pendapatan rumah sakit berasal dari klaim BPJS Kesehatan. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu sumber pendapatan berpotensi menimbulkan risiko terhadap arus kas rumah sakit apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang mampu menjaga stabilitas keuangan rumah sakit dalam jangka panjang.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara penerapan PPK-BLUD dengan kinerja keuangan rumah sakit. Secara teoritis, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diberikan kepada BLUD seharusnya mampu meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola pendapatan, belanja, kas, dan kewajiban. Namun demikian, fakta adanya utang yang cukup besar dan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan BPJS menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan PPK-BLUD dalam mendukung kinerja keuangan rumah sakit.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan RSUD Datu Beru Takengon sebagai objek penelitian dengan mengaitkan PPK-BLUD dan kinerja keuangan dalam konteks fenomena utang rumah sakit dan ketergantungan pendapatan terhadap BPJS Kesehatan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penerapan PPK-BLUD pada

rumah sakit daerah di Aceh yang masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **"Analisis Pola Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon?
2. Bagaimana kinerja keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon
2. Menganalisis kinerja keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya pada penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan kinerja keuangan rumah sakit. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara penerapan PPK-BLUD dengan kinerja keuangan BLUD serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan perbedaan temuan mengenai efektivitas penerapan PPK-BLUD dalam meningkatkan kinerja keuangan rumah sakit.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi RSUD Datu Beru Takengon

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan rumah sakit dan memberikan informasi mengenai kondisi pola pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan RSUD Datu Beru Takengon berdasarkan hasil analisis rasio keuangan.

   b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penerapan PPK-BLUD pada rumah sakit daerah.